



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 4 TAHUN 2016

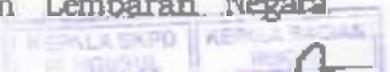
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa, guna peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa, maka Bupati Jepara perlu menetapkan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat pengelola keuangan Daerah atau disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan atau disingkat Bapermades adalah Kepala Satuan Kerja Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah Kabupaten Jepara;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

11. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Des adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
18. Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari APBD Kabupaten Jepara yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
20. Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan ADD.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

- (1) ADD di hitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata di seluruh desa.
 - b. 40% (empat puluh per seratus) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

c. Formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X &= Y + Z \\ Y &= (W \times 0,6) : \text{Jumlah desa} \\ Z &= E \times W \times 0,4 \\ E &= \frac{A + B + C + D}{4} \end{aligned}$$

Keterangan:

W = jumlah total ADD Kabupaten

X = Jumlah ADD setiap desa

Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa (60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan

Z = jumlah proporsional ADD setiap desa (40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan

E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D per desa

A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan

C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan

D = rasio tingkat kesulitan geografis setiap desa mengacu pada indeks:

- desa tingkat kesulitan rendah, dengan indeks 6
- desa tingkat kesulitan sedang, dengan indeks 7
- desa tingkat kesulitan tinggi, dengan indeks 8
- desa tingkat kesulitan sangat tinggi dengan indeks 9

Kriteria tingkat kesulitan geografis:

- Rendah : Sarpras baik, dekat dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih baik.
- Sedang : Sarpras cukup, tidak terlalu jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi cukup sulit.
- Tinggi : Sarpras kurang, jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria rendah dan sedang.
- Sangat Tinggi : Sarpras kurang, lebih jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria tinggi.

(2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Petinggi dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) Pengalokasian ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dengan perhitungan sebagai berikut :

a.ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus).

b.ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maksimal 50% (lima puluh per seratus).

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maksimal 40% (empat puluh per seratus).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis;
- (4) Besaran Siltap sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara nomor 21 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jepara nomor 10 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi petinggi dan perangkat desa.

Pasal 4

ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa, sisanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
- b. Tunjangan Asuransi Jiwa bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa.
- d. Operasional pemerintahan desa dan BPD
- e. Tunjangan lainnya bagi petinggi & perangkat desa.
- f. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, keperluan rutin / pemeliharaan kantor Pemerintahan Desa).
- g. Tunjangan & operasional BPD.
- h. Insentif RT & RW.

Pasal 5

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 tidak boleh melebihi 30 % dari jumlah total belanja desa yang tercantum dalam APBDesa.

Pasal 6

Paling sedikit 70 % dari jumlah total belanja desa yang tercantum APBDesa digunakan untuk menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana



- b. Pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya.
- c. Kegiatan menunjang Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes dan RKPDes, APBDes serta LKPJDesa LPPDesa dan LKPPDesa.
- d. Menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain : Pokja Posyandu, Posyandu, Penanganan Gizi Buruk, Pemberantasan Sarang Nyamuk, Forum Kesehatan Desa, Desa Siaga Aktif, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Kader Kesehatan Desa dan Sub Klinik Desa (SKD) serta Operasional Kader Keluarga Berencana (KKBK) dan bidang kesehatan lainnya.
- e. Pendataan Profil Desa, Data Statistik Desa dan Data Swadaya Masyarakat Desa.
- f. Pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor desa, pembangunan serta rehab Kantor Desa dan Balai Desa.
- g. Pembuatan data dinding, papan monografi struktur organisasi dan kelengkapan administrasi desa dsb.
- h. Pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan peribadatan.
- i. Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan masyarakat / BUMDes dan usaha ekonomi desa lainnya.
- j. Menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat / Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan konsultan pembimbing.
- k. Menunjang kegiatan PKK Desa, LKMD, RT, RW, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Lain.
- l. Menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga.
- m. Menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas desa, Promosi Potensi Desa dan atau Pelestarian Budaya Lokal.
- n. Menunjang Kegiatan Linmas/Kamtibmas (pakaian, sarana prasarana dll).
- o. Menunjang Kegiatan Pemilihan Petinggi dan Pemilihan Bupati.
- p. Menunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penanganan Pengungsi (sarana handy talky dll).
- q. Menunjang Pelaksanaan Penghijauan dan konservasi lahan kritis desa serta pembangunan Bank Sampah di Desa.
- r. Menunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM aparat Pemerintahan Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (pelatihan/ Bintek/workshop/se jenisnya).
- s. Menunjang pembuatan modem/web dan monografi profil desa.
- t. Menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

- u. Menunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berskala desa.
- v. Menunjang kegiatan PMI;
- w. Menunjang lomba produk unggulan.
- x. Pengadaan tanah dan/atau Sertifikasi tanah - tanah desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset desa.
- y. Menunjang Kegiatan pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Petinggi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Petinggi menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa sesuai RPJMDes.
- (3) Petinggi menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama.

Pasal 8

- (1) RAPBDes yang telah disepakati bersama oleh Petinggi dan BPD dikirimkan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Setelah Perdes tentang APBDes diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi menyusun dan mengesahkan DPA.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim yang melibatkan anggota LKMD/LPMD, masyarakat dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing - masing.

Pasal 9

Guna mencairkan ADD setiap desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah.

Pasal 10

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa Petinggi menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan Perangkat Desa lainnya dengan SK Petinggi.

Pasal 11

Guna pengoptimalan pengelolaan ADD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJMdesa, RKPdes, RAPBDes, APBDes, RAB dan DPA;
- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD.
- e. Menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan keuangan Desa setiap bulan.
- f. Menyampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan Penggunaan ADD Kepada Bupati Jepara.

Pasal 13

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah:

- a. Melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV

TAHAP PENYALURAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap perbulan terkecuali bagi Desa lunas Pajak PBB dapat sekaligus mengajukan pencairan 100% paling cepat pada bulan agustus.
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengajuan ADD diatur sebagai berikut:
- a. Petinggi mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq PPKD melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari Bapermades.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
 1. Rencana penggunaan ADD.
 2. Bukti kwitansi yang sah.
 3. Pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh petinggi diatas materai 6000.
 4. Foto copy KTP petinggi, bendahara desa dan rekening buku kas desa.
 - c. Tim pembina kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk cek list.
 - d. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar pencairan ADD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq Kepala PPKD.
 - e. Berdasarkan permohonan pencairan ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana di maksud pada huruf d, Kepala PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.
- (2) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan Anggaran tiap kegiatan yang ada di DPA Desa, diajukan oleh petinggi kepada Bank setelah mendapatkan surat pengantar dari Camat.
- (3) Segala penggunaan ADD menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penerimaan kepada Bupati setelah menerima ADD yang telah dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah kerekening kas Desa melalui camat.
- (2) Petinggi dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD pada setiap akhir tahapan.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyahuran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai persyaratan untuk penyahuran ADD

- (4) Petinggi menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran.
- (5) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh desa tentang kebenaran dokumen tersebut;
- (6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD hanya dapat diperiksa oleh lembaga pengawas fungsional dan lembaga pengawas lainnya.
- (7) Petinggi penerima ADD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan ADD.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi administrasi penyaluran dan penggunaan ADD.
- (4) Pemantauan sebagaimana ayat (3) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan petinggi maupun keputusan petinggi tentang pengelolaan keuangan ADD.
 - b. Penyaluran ADD dari rekening kas desa kepada pelaksana kegiatan.
 - c. Penyampaian laporan realisasi.
 - d. SiLPA ADD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Perhitungan rencana penggunaan ADD;
 - b. Realisasi administrasi penggunaan ADD.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 18

- (1) Pengawasan penggunaan dana ADD bisa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Masyarakat maupun oleh lembaga pengawasan Fungsional lainnya;

Lampiran I : Peraturan Bupati Jepara
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tahun : 11 Januari 2016

LAPORAN REALISASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) | BULAN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

NO	JUMLAH ANGGARAN	SP2D / TGL PENERIMAAN DI REK. DESA	TGL PENCAIRAN DARI REK. DESA	KET
1				
2				
3				
	0			

Mengetahui
CAMAT

PETINGGI

(.....)

(.....)

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN/PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARA
Sekretaris Daerah	8
Asisten I	10
Kepala Bidang	10
Kasubag	10
Kepala Subbidang	10

Lampiran II : Peraturan Bupati Jepara
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tahun : 11 Januari 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BULAN TAHUN ANGGARAN 20....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL SURTI PENYALURAN (BP2D)	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN	BALDO	KET
			(DEBIT)	(KREDIT)		
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)					
1.2.1.1	BULAN					
1.2.1.2	BULAN					
1.2.1.3	dst.					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan, dst.					
2.3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	kegiatan, dst.					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	kegiatan, dst.					
2.5	Bidang Pembinaan Kemitraan					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	kegiatan, dst.					
	JUMLAH					

Mengetahui
 CAMAT

PEMILIK

(.....)

(.....)

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NO. SURAT	TANGGAL
Sekretaris	2
Auditor I	1
Kepala B.	1
Kasubag	
Kepala SK/	anggota
	AN HUKUM

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BULAN TAHUN ANGGARAN 20....
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Kab Rp.

KODE REK.	URAIAN	KOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENTALURAN (SP2D)	PENTALURAN			PENGUSAHAAN			NET
			JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENTALURAN KE DESA (KREDIT)	SALDO	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENTALURAN KE DESA (KREDIT)	SALDO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10
A	PENDAPATAN								
A.1	Pendapatan Transfer								
	Saldo Awal								
	BULAN								
	BULAN								
	dst.								
B.1	BRIANJA BANTUAN KE DESA								
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
B.1.1.1	Kegiatan								
B.1.1.2	Kegiatan, dst.								
B.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
B.1.2.1	Kegiatan								
B.1.2.2	Kegiatan, dst.								
B.1.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.1.3.1	Kegiatan								
B.1.3.2	Kegiatan, dst.								
B.1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.1.4.1	Kegiatan								
B.1.4.2	Kegiatan, dst.								
B.2	DELANJA BANTUAN KE DESA								
B.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
B.2.2.1	Kegiatan								
B.2.2.2	Kegiatan, dst.								
B.2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.2.3.1	Kegiatan								
B.2.3.2	Kegiatan, dst.								
	JUMLAH								

Mengesah
CAMAT

Disetujui Oleh
BUPATI

Keterangan Kolom

- 3 Di isi Tanggal dan Nomor SP2D/bukti lainnya yang sah Penyaluran Dana Desa dari Kab/Kota atau dari Kab/Kota ke
- 4 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab / Kota
- 5 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Kab / Kota ke Desa
- 6 Di isi selisih antara penerimaan dan penyaluran
- 7 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab / Kota
- 8 Di isi Jumlah nilai kegiatan
- 9 Di isi selisih antara penerimaan dari Pusat dan penyaluran di desa
- 10 Penjelasan sebab terjadinya selisih
- B.1.2.1 Di isi dengan nama kegiatan/anggot seperti Jalan Desa, Embung, dst. Desa, Kelompok Usaha Tani, dst.

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sebutan Danda	